

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Fenomena yang terjadi di Indonesia dalam perkembangan sektor publik di Indonesia yakni meningkatnya tuntutan dari masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi atas lembaga - lembaga sektor publik di lingkup pusat maupun lingkup daerah. Pemerintah yang sebagai organisasi yang bergerak pada pelayanan publik dalam pengelolaannya juga harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Suryani dan Ismail, 2018).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil – hasil yang dicapainya (Sawir, 2017). Hal ini diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Usaha yang harus dilakukan demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan lembaga-lembaga sektor publik di lingkup pusat maupun lingkup daerah yakni dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan media bagi suatu entitas, dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya terhadap publik. Laporan Keuangan dapat memberikan informasi-informasi serta merepresentasikan kinerja pemerintahan pusat maupun daerah mulai dari perencanaan, realisasi, evaluasi yang nantinya akan disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan di setiap periodenya (Lestari dan Dewi, 2020).

Laporan keuangan akan sangat bermanfaat dan bias memberikan informasi yang jelas untuk pengguna laporan keuangan apabila laporan keuangan yang disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban memiliki kualitas dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pelaporan keuangan juga harus memenuhi unsur relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip akuntansi dan pedoman pedoman dalam menyusun atau menyajikan laporan keuangan. Berpedoman dengan SAP dapat memudahkan aparatur bagian keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan standar akuntansi pemerintah diyakini dapat memberikan solusi untuk setiap permasalahan keuangan yang terjadi dalam instansi pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Pujanira dan Taman, 2017).

Penelitian tentang Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah sebelumnya telah dilakukan oleh Ni Luh Wayan Triya Lestari dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi (2020), Putriasri Pujanira (2017), Astika Rahmawati, I Wayan Mustika, dan Lilik Handaya Eka (2018) yang menyimpulkan bahwa pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dalam suatu entitas pemerintah juga merupakan faktor yang tidak bisa dilupakan demi terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas. Perlu dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, akuntansi keuangan daerah, dan bahkan oprganisasional tentang pemerintahan. Hal ini dikarenakan kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat tepat waktu (Pujanira dan Taman, 2017).

Penelitian tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia sebelumnya telah dilakukan oleh Putriasri Pujinira (2017), Hartono dan Ramadany (2020), dan Helena (2021) yang

menyimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berkualitas atau tidaknya suatu laporan keuangan juga didukung oleh tersedianya perangkat-perangkat pendukung seperti adanya teknologi informasi. Pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan baik apabila didukung dengan fasilitas yang ada pada instansi tersebut. Fasilitas yang dimaksud berupa kecanggihan teknologi yang tersedia pada suatu instansi.

Salah satu hal yang juga mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan mendesain sistem informasi berbasis teknologi komputer atau website. Sistem informasi yang didukung TI dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif.

Informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Teknologi informasi selain berfungsi sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga memiliki fungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyampaian dan penyebaran informasi (Harry Apriansyah, Sri Rahayu, dan Misni Erwati, 2020).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Rachmawati, dkk (2018) yang meneliti tentang pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan SKPD menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tangerang Selatan. Hasil penelitian lain yang mendukung yaitu Alamsyah, dkk (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Depok.

Kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia permasalahan-permasalahan terkait kualitas laporan keuangan masih sering kita jumpai, hal ini diakibatkan karena pemerintah kurang

serius dalam membenahi permasalahan tersebut sehingga berakibat pada kurang berkualitaskannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo yakni, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 mulai diperiksa Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Pada hasil temuan di lapangan, Laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak yang terdapat belum memenuhi standar yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku.

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilaporkan dalam IHPS semester I tahun 2017 menemukan bahwa pengungkapan hasil pemeriksaan atas 537 LKPD, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 375 LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 139 LKPD, opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 23 LKPD.

Menurut hasil evaluasi BPK yang dikutip dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 menungkapkan hasil pemeriksaan atas 537 LKPD pada tahun 2016 terjadi 6.053 kasus. Permasalahan tersebut meliputi 2.156 (36%) kelemahan akuntansi dan pelaporan, 2.657 (44%) kelemahan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan sebanyak 1.240 (20%) atas 5 kelemahan struktur pengendalian internal.

Hasil evaluasi oleh BPK tersebut dapat menunjukkan bahwa LKPD yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada umumnya memiliki pemahaman standar akuntansi pemerintah yang baik. Dalam melakukan pemeriksaan, BPK menemukan kasus yang terdiri dari Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai dan belum didukung oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Memadai. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang terjadi dilapangan khususnya yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, pengaruh

Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan, pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun kualitas laporan keuangan. Dimana peneliti memfokuskan untuk menggunakan objek penelitian yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan kecanggihan teknologi informasi yang ada pada instansi tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini:

##### **1. Manfaat Teoritis**

###### **a. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya dan sebagai kontribusi pembeding untuk ilmu pengetahuan.

###### **b. Bagi penulis**

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan serta referensi tentang pengaruh pemahaman standar akuntansi keuangan pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis.

###### **c. Bagi penelitian selanjutnya**

Penelitian ini mampu berkontribusi untuk perkembangan ilmu akuntansi serta sebagai referensi penelitian di masa yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi**

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa akuntansi terkait pemahaman tentang standar akuntansi keuangan pemerintah, dan kompetensi yang harus dimiliki dalam ketika bekerja di pemerintahan.

###### **b. Bagi pegawai BPKAD Kabupaten Sidoarjo**

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada pegawai pemerintah khususnya pegawai BPKAD Kabupaten Sidoarjo tentang tingkat pemahaman

standar akuntansi pemerintah, tingkat kompetensi sumber daya manusia, dan tingkat kecanggihan teknologi informasi di BPKAD Kabupaten Sidoarjo.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta edukasi kepada masyarakat tentang tingkat pemahaman standar akuntansi pemerintah pegawai pemerintahan dan tingkat kompetensi sumber daya manusia di BPKAD Kabupaten Sidoarjo